

PARTISIPASI KARANG TARUNA DALAM PENGELOLAAN WISATA DESA PANDANREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU

Youth Organization Participation in the Management of Pandanrejo Tourism Village Bumiaji District Batu City

Felisitas Emerentiana K
Henjang^{1*}
Abd. Rohman¹

¹Universitas Tribhuwana
Tunggadewi, Malang

*corresponding author:
email: claraafheli@gmail.com

Kata Kunci:

Partisipasi
Karang taruna
Pengelolaan wisata
Desa Pandanrejo

Keywords:

Participation
Youth Organization
Tourism management
Pandanrejo Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi Sumampouw serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Karang Taruna telah berjalan pada enam prinsip partisipasi, yaitu cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggung jawab, dan kerja sama. Namun, prinsip kesetaraan dan kemitraan belum sepenuhnya optimal karena pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh pemerintah desa. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang baik, dukungan pemerintah desa, kerja sama antarpemangku kepentingan, serta ketersediaan sarana pendukung. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi sebagian anggota, belum optimalnya mekanisme akuntabilitas, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatan anggota, tetapi juga oleh tata kelola kolaboratif yang mendukung pengelolaan wisata desa secara berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the participation of the Youth Organization (Karang Taruna) in managing Pandanrejo Village tourism, Bumiaji District, Batu City, based on Sumampouw's participation principles and to identify the supporting and inhibiting factors. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the participation of Karang Taruna has been implemented across six participation principles: coverage, equal partnership, transparency, equal authority, sharing responsibility, and cooperation. However, the principle of equal partnership has not been fully achieved because strategic decision-making remains dominated by the village government. Supporting factors include effective communication, village government support, stakeholder collaboration, and the availability of supporting facilities. Inhibiting factors include limited human resources, uneven member participation, limited accountability mechanisms, and inadequate supporting facilities. The study concludes that the quality of participation depends not only on member involvement but also on collaborative governance that strengthens sustainable village tourism management.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 01-05-2026

Accepted: 17-07-2026

Published: 20-07-2026

PENDAHULUAN

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019, Karang Taruna memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan potensi sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pemuda dalam pengembangan sektor pariwisata desa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam keberhasilan pembangunan berbasis komunitas, termasuk dalam pengelolaan wisata desa. Made Pidarta menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan melalui kontribusi pemikiran, emosi, tenaga, maupun kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama (Pidarta, 2006). Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi juga mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wisata desa sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masyarakat sebagai aktor utama pembangunan (Hadiyanti, 2011).

Desa Pandanrejo merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang memiliki potensi wisata alam dan agrowisata yang terus dikembangkan sebagai daya tarik wisata daerah. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pandanrejo Nomor 147/14/KEP/422.330.7/2021, Karang Taruna Gempar

ditetapkan sebagai pengelola wisata desa yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata serta penyampaian laporan secara berkala kepada Kepala Desa. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memberdayakan pemuda melalui pengelolaan wisata berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi wisata Desa Pandanrejo meliputi Wisata Lumbung Stroberi dan Wisata Coban Lanang yang menjadi destinasi unggulan di Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Desa Pandanrejo, kedua destinasi tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, implementasi pengelolaan wisata desa masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait tingkat keterlibatan anggota Karang Taruna yang belum merata, keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan masing-masing anggota, serta masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa masih memerlukan penguatan.

Penelitian ini secara sengaja menggunakan istilah "partisipasi" dan bukan "peran" karena keduanya memiliki makna yang berbeda dalam perspektif administrasi publik. Istilah "peran" cenderung menggambarkan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan "partisipasi" menempatkan masyarakat sebagai aktor yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, konsep partisipasi lebih mencerminkan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan adanya pembagian kewenangan (*power sharing*) dibandingkan sekadar pembagian tugas (*task sharing*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori

partisipasi Sumampouw (2007) yang terdiri atas enam prinsip, yaitu cakupan, kesetaraan dan kemitraan (*equal partnership*), transparansi, kesetaraan kewenangan (*equal authority*), kesetaraan tanggung jawab (*equal responsibility*), dan kerja sama.

Berdasarkan observasi awal, partisipasi Karang Taruna Gempar dalam pengelolaan wisata desa belum sepenuhnya melibatkan seluruh anggota organisasi. Dari sekitar 45 anggota yang terdaftar, hanya sekitar 7–10 orang yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan wisata desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi anggota masih bervariasi sehingga perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi. Temuan awal ini menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi pemuda, tetapi juga oleh kualitas keterlibatan anggotanya dalam setiap tahapan pengelolaan wisata.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yohana, Yuli, dan Dwi (2021) mengenai peran Karang Taruna dalam pembangunan Desa Pandanrejo menunjukkan bahwa keterlibatan Karang Taruna belum optimal akibat keterbatasan waktu serta rendahnya partisipasi sebagian anggota dalam kegiatan organisasi. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran Karang Taruna dalam pembangunan desa secara umum dan belum mengkaji kualitas partisipasi berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi yang dikemukakan Sumampouw (2007). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana kualitas partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa ditinjau dari enam prinsip partisipasi tersebut.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis partisipasi Karang Taruna menggunakan enam prinsip partisipasi Sumampouw (2007). Pendekatan ini tidak hanya menilai tingkat keterlibatan Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik partisipasi dengan

prinsip-prinsip partisipasi dalam administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata Desa Pandanrejo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata Desa Pandanrejo berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai bentuk partisipasi, faktor pendukung, serta faktor penghambat yang memengaruhi keterlibatan Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa (Sugiyono, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan fokus pada partisipasi Karang Taruna Gempar sebagai pengelola wisata desa. Fokus penelitian meliputi partisipasi Karang Taruna berdasarkan enam prinsip partisipasi Sumampouw (2007), yaitu cakupan (*coverage*), kesetaraan dan kemitraan (*equal partnership*), transparansi (*transparency*), kesetaraan kewenangan (*equal authority*), kesetaraan tanggung jawab (*equal responsibility*), dan kerja sama (*cooperation*), serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi dalam pengelolaan wisata desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, arsip Karang Taruna, peraturan perundang-undangan, buku,

artikel ilmiah, serta sumber daring yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan wisata, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen organisasi, foto kegiatan, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya hingga informasi yang diperoleh mencapai kejenuhan (*data saturation*) (Sugiyono, 2018). Teknik ini dipilih karena penelitian memerlukan informan yang benar-benar memahami pengelolaan wisata desa dan keterlibatan Karang Taruna dalam setiap kegiatan. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Pandanrejo, yang selanjutnya merekomendasikan informan lain sesuai dengan kebutuhan penelitian, antara lain pengurus Karang Taruna Gempar, perangkat desa, pengelola wisata, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata desa.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga setiap temuan dapat diverifikasi secara terus-menerus.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Penerapan triangulasi teknik bertujuan meningkatkan kredibilitas data sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi (Sugiyono, 2018).

HASIL

Partisipasi adalah pelibatan seseorang dan beberapa orang dalam suatu kegiatan. Salah satu adanya partisipasi Karang Taruna. Berdasarkan Keputusan kepala desa Pandanrejo kecamatan bumiagi kota batu No 147/14/KEP/422.330.7/2021 bahwa dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata desa perlu dibentuk pengelola wisata desa sehingga Karang taruna Gempar

Cakupan Partisipasi Dalam Pengelolaan Wisata Desa

Dalam proses pengelolaan wisata desa Pandanrejo semua pihak mulai dari Masyarakat, karang taruna dan pihak desa sudah ikut terlibat. Sesuai dengan penyampaian.

Ketua Karang Taruna yoga pada Selasa, 18 November 2025 menjelaskan bahwa:

“semua masyarakat desa Pandanrejo dilibatkan atau terkena dampak dari pengelolaan wisata desa, yang mana setiap adanya event yang diadakan oleh karang taruna dalam pengelolaan dan pelaksanaan wisata. Masyarakat di setiap dusun yang ada di desa Pandanrejo selalu terlibat aktif, begitu juga dengan pihak aparat desa”.

Partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa melalui cakupan partisipasi dalam pengelolaan wisata desa Pandanrejo, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa semua orang atau wakil-wakil dari setiap kelompok sudah terkena dampak atau ikut serta dalam proses pengelolaan wisata desa. Partisipasi tidak hanya terbatas pada kelompok yang dominan atau vokal, tetapi telah mencakup semua pihak yang ada di wilayah desa Pandanrejo.



Kesetaraan atau Kemitraan (*Equal Partnership*) Partisipasi

Prinsip ini menolak hubungan yang bersifat hierarkis atau satu arah. Kemitraan yang sejati dibangun atas dasar saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan pembagian kekuasaan yang adil, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi pihak lain. Kesetaraan dan kemitraan dalam partisipasi juga berarti bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Karang Taruna dan pihak desa memiliki hubungan satu arah itu dibuktikan dengan kerjasama yang baik antara pihak desa dan karang taruna. Sekretaris desa menyampaikan pada Selasa, 18 November 2025 sebagai berikut :

“seperti yang sudah saya katakan bahwa, untuk saat ini anggota karang taruna memang sudah aktif, namun ada beberapa anggota nya tidak hadir saat ada kegiatan ditempat wisata, saat event ataupun saat didesa karena berbagai alasan adapun dinamika hubungan antara pihak desa dan anggota karang taruna, bahwa memiliki hubungan satu arah, karena wisata desa ini dibawah naungan kami dan dikelola oleh pihak karang taruna”

Disini Sekretaris desa sudah mempertegas bahwa karang taruna sudah aktif namun ada beberapa yang memang tidak bisa hadir karena suatu kendala, serta adanya hubungan satu arah antara pihak desa dan pihak karang taruna.

terkait partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa Pandanrejo dengan cara Kesetaraan atau kemitraan (*equal partnership*) partisipasi dalam

pengelolaan wisata desa, peneliti mengambil kesimpulan bahwa adanya hubungan yang setara dan kerjasama serta hubungan satu arah antara karang taruna dan aparat desa. Hal ini di buktikan dalam rapat koordinasi perangkat desa dan Karang taruna Pandanrejo.



Transparansi Partisipasi

Transparansi dalam prinsip partisipasi menurut Sumampouw merujuk pada pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam proses partisipasi. transparansi berarti bahwa semua informasi yang relevan tentang proses partisipasi, termasuk tujuan, proses, dan hasil, harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terkait. Hal ini memungkinkan semua pihak untuk memahami proses partisipasi dengan jelas dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

Pihak karang taruna telah melakukan pelaporan LPJ secara transparan dan diketahui oleh semua pihak desa serta masyarakat desa, mulai dari pelaporan LPJ dan rencana program kerja kedepannya telah dilaksanakan secara transparan oleh pihak karang taruna

Sesuai dengan penyampaian dari ketua karang Taruna sendiri yakni Yoga pada Selasa 18 November 2025 mengatakan bahwa:

“karang taruna dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata, selalu menyiapkan LPJ dan melaporkan hasil kerjanya kami, dan dana yang kami gunakan dan dapatkan selalu disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa, bukan hasil kerja saja yang disampaikan tetapi apa rencana program kerja kami untuk 6 bulan kedepannya juga selalu kami sampaikan dan disampaikan kepada masyarakat dan

perangkat desa terlebih untuk umum biar banyak orang yang megetahui”

Partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa melalui, Transparansi partisipasi dalam pengelolaan wisata desa peneliti menarik kesimpulan bahwa, anggota karang taruna telah melakukan pelaporan LPJ secara transparan dan diketahui oleh semua pihak desa serta masyarakat desa. mulai dari pelaporan LPJ dan rencana program kerja kedepannya telah dilaksanakan secara transparan oleh pihak karang taruna.



Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power /Equal Power Ship*) Partisipasi

Karang taruna selalu melakukan briefing dan evaluasi tim sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan hal ini dilakukan untuk menghindari konflik sesama tim terkait partisipasi karang taruna dalam pengelolaan wisata desa Kesetaraan kewenangan (*sharing power /equal power ship*) partisipasi dalam pengelolaan wisata desa melalui peneliti menarik kesimpulan bahwa, karang taruna selalu menghindari konflik antara sesama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan wisata desa selalu memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan saran dan masukan dan sampai dengan saat ini belum ada konflik yang terjadi.



Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*) Partisipasi

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses saling belajar dan saling memperdayakan satu sama lain. Seiring dengan kewenangan yang setara, setiap pihak yang terlibat juga harus memikul tanggung jawab yang seimbang atas keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program atau proyek. Tanggung jawab bersama ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif dan mendorong semua pihak untuk berkontribusi secara maksimal, bukan sekadar menjadi penonton pasif.

semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata desa sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. tugas dan tanggung jawab ini dibagi saat penentuan program kerja.

semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata desa sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tugas dan tanggung jawab ini dibagi saat penentuan program kerja



Kerjasama Partisipasi

diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Dengan kerjasama, semua pihak dapat memanfaatkan kekuatan dan kelebihan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan.

karang taruna selalu mengutamakan yang namanya kalaborasi dan komunikasi terutama Kerjasama dengan kaur Humas, event yang diadakan merupakan salah satu bentuk kaloborasui yang dilakukan oleh karang

sesuai dengan penyampaian dari Andri selaku manager operasional pada Kamis, 27 November 2025 mengatakan bahwa:

“untuk sesama yang memang berbeda pendapat dengan kami, sering kami ajak untuk kami bicarakan dengan baik, dan kami juga menghargai pendapat mereka, bukan hanya itu kami sering mengutamakan yang namanya komunikasi yang baik dan efektif, sehingga sejauh ini tidak ada konflik yang pernah terjadi kami juga sering melakukan kerjasama yang baik dengan kaur humas di desa, sehingga memudahkan kami saat kami mau mengadakan event atau kegiatan nah bagian kaur humas menyebarkan undangan secara online saja, begitu juga sebaliknya dari pihak desa, misalkan ada butuh sesuatu dari kita pastinya lewat kaur Humas untuk menghubungi kami. contohnya dari pihak desa butuhnya pemandu wisata, jadi kaur humas tinggal menghubungi pemandu wisata atau ketua karang tarunanya, sehingga pemandu wisatanya tinggal kami berangkatkan.”

bahwa karang taruna selalu mengutamakan yang namanya kalaborasi dan komunikasi, serta adanya kerjasamanya yang baik juga antara karang taruna dan kaur humas di desa hal ini dapat memudahkan karang taruna dalam memberikan informasi atau undangan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan wisata desa serta event yang diadakan. salah satu bentuk kaloborasui yang dilakukan oleh karang taruna yakni event.



PEMBAHASAN

Cakupan Partisipasi (Coverage)

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). Menurut Sumampouw (2007), prinsip cakupan (*coverage*) menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh suatu kebijakan atau program pembangunan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sesuai kapasitas dan perannya. Dalam konteks pengelolaan wisata desa, cakupan partisipasi tidak hanya diukur dari jumlah individu yang terlibat, tetapi juga dari keterbukaan organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, pemerintah desa, maupun kelompok pemuda untuk berkontribusi dalam seluruh tahapan pengelolaan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna Gempar telah menjadi aktor utama dalam pengelolaan wisata Desa Pandanrejo sesuai Keputusan Kepala Desa Pandanrejo Nomor 147/14/KEP/422.330.7/2021. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memberdayakan generasi muda sebagai pengelola wisata berbasis masyarakat. Selain melibatkan pengurus Karang Taruna, pengelolaan wisata juga melibatkan pemerintah desa serta masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan operasional, seperti pelayanan wisata, pemeliharaan sarana, promosi destinasi, dan penyelenggaraan kegiatan wisata. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan wisata telah membuka ruang partisipasi bagi berbagai

unsur masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah desa sebagai penyelenggara utama.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cakupan partisipasi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan observasi lapangan, dari sekitar 45 anggota Karang Taruna Gempar, hanya sekitar 7–10 anggota yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan wisata desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan berpartisipasi memang telah tersedia, namun belum seluruh anggota memanfaatkannya secara aktif. Rendahnya tingkat keterlibatan sebagian anggota dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan, serta beragamnya tingkat komitmen terhadap organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi prinsip cakupan belum dapat diukur hanya dari adanya ruang partisipasi, tetapi juga dari tingkat keterlibatan nyata anggota organisasi dalam setiap aktivitas pengelolaan wisata.

Temuan penelitian ini memperkuat pendapat Sumampouw (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi yang berkualitas tidak hanya menuntut adanya kesempatan yang terbuka, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, prinsip cakupan tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitas partisipan, tetapi juga kualitas keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat memerlukan strategi untuk meningkatkan motivasi dan komitmen masyarakat agar berpartisipasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Yohana, Yuli, dan Dwi (2021) yang menemukan bahwa keterlibatan Karang Taruna dalam pembangunan Desa Pandanrejo masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan rendahnya partisipasi sebagian anggota organisasi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perkembangan yang berbeda. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan keterbatasan partisipasi pemuda,

penelitian ini menemukan bahwa pemerintah desa telah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui pelibatan masyarakat dan Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan Karang Taruna telah berkembang, meskipun pemerataan partisipasi antaranggota masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip cakupan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya wadah organisasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun keterlibatan seluruh anggotanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasi melalui pelatihan, penguatan kepemimpinan, regenerasi kepengurusan, dan pemberian ruang inovasi bagi anggota menjadi strategi penting untuk memperluas cakupan partisipasi dalam pengelolaan wisata desa. Temuan ini menjadi kontribusi penelitian karena menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak cukup diukur dari keberadaan organisasi masyarakat, tetapi juga dari tingkat keterlibatan aktif anggotanya dalam mewujudkan tata kelola wisata desa yang partisipatif.

Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*)

Prinsip kesetaraan dan kemitraan (*equal partnership*) menempatkan seluruh aktor pembangunan sebagai mitra yang memiliki kedudukan setara dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Sumampouw (2007), kemitraan yang efektif dibangun atas dasar saling menghormati, saling percaya, komunikasi yang terbuka, serta pembagian peran yang proporsional. Prinsip ini menolak hubungan yang bersifat hierarkis atau dominatif karena setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berkontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa Pandanrejo, Karang Taruna Gempar,

dan masyarakat telah mencerminkan adanya kerja sama dalam pengelolaan wisata desa. Pembagian tugas operasional dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing pihak, sedangkan berbagai pelatihan, seperti pelatihan pemandu wisata, pengelolaan media sosial, dan pengelolaan keuangan, diberikan kepada anggota Karang Taruna sebagai bentuk penguatan kapasitas organisasi. Selain itu, anggota Karang Taruna memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide, keterampilan, serta gagasan dalam mendukung pengembangan wisata desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang bagi Karang Taruna untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan wisata.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hubungan kemitraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan sebagaimana dikemukakan Sumampouw (2007). Karang Taruna secara kelembagaan masih berada di bawah koordinasi pemerintah desa sehingga beberapa keputusan strategis tetap berada pada kewenangan pemerintah desa. Dengan demikian, meskipun terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik, distribusi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berlangsung secara setara. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbangun lebih tepat dipahami sebagai kemitraan kolaboratif daripada kemitraan yang sepenuhnya setara.

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian Siti Nur Khasanah dan Tamrin (2023) yang menekankan pentingnya pemberdayaan Karang Taruna melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan aset masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi pemuda. Sementara itu, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas organisasi perlu diikuti oleh penguatan posisi Karang Taruna dalam proses pengambilan keputusan

agar kemitraan yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif.

Dengan demikian, keberhasilan prinsip *equal partnership* dalam pengelolaan wisata Desa Pandanrejo belum sepenuhnya ditentukan oleh adanya pembagian tugas atau koordinasi antaraktor, melainkan oleh sejauh mana setiap pihak memiliki kesempatan yang setara dalam memengaruhi keputusan organisasi. Kontribusi penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan dalam pengelolaan wisata desa bersifat dinamis, yaitu telah berkembang menuju pola kolaboratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pembagian kewenangan agar prinsip kesetaraan dapat terwujud secara lebih substantif. Temuan ini sekaligus menjawab bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak hanya memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi juga mekanisme tata kelola yang memberikan ruang partisipasi yang lebih seimbang bagi seluruh aktor pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi Karang Taruna Gempar dalam pengelolaan wisata Desa Pandanrejo telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan wisata berbasis masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Desa Pandanrejo Nomor 147/14/KEP/422.330.7/2021. Penerapan prinsip partisipasi menunjukkan bahwa aspek cakupan (*coverage*), transparansi (*transparency*), kesetaraan kewenangan (*equal authority*), kesetaraan tanggung jawab (*sharing responsibility*), dan kerja sama (*cooperation*) telah berjalan dengan baik dalam mendukung pengelolaan wisata desa. Sementara itu, prinsip kesetaraan dan kemitraan (*equal partnership*) telah terbangun melalui koordinasi dan kolaborasi antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan masyarakat, namun belum sepenuhnya mencerminkan hubungan yang setara karena pengambilan keputusan

strategis masih didominasi oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi Karang Taruna telah berkembang menuju tata kelola kolaboratif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pembagian kewenangan dan pemberdayaan organisasi.

Faktor yang mendukung partisipasi Karang Taruna meliputi komunikasi yang baik antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan masyarakat, dukungan pemerintah desa terhadap pengelolaan wisata, kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan gagasan dan terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta terbangunnya kerja sama dalam pengelolaan wisata desa. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang aktif, belum optimalnya literasi dan kapasitas sebagian anggota dalam pengelolaan wisata, belum tersedianya media informasi organisasi di lokasi wisata, belum adanya mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang lebih terbuka kepada masyarakat, serta faktor cuaca yang memengaruhi aktivitas wisata. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas partisipasi memerlukan penguatan kapasitas organisasi, sistem koordinasi, dan mekanisme akuntabilitas agar pengelolaan wisata desa dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa kualitas partisipasi Karang Taruna dalam pengelolaan wisata desa tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatan anggota, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun tata kelola kolaboratif berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi. Dengan demikian, penguatan kelembagaan Karang Taruna, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme kemitraan yang lebih setara antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan wisata desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Hadiyanti. (2011). *Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Pedoman Desa Wisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Pidarta, M. (2006). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rizky, E. R., Afifudin, & Roni, P. W. (2020). Peran Karang Taruna dalam pengembangan wisata Panorama Jurang Toleh (Studi pada Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 72–81.
- Siti, N. K. S., & Tamrin, F. (2023). Pemberdayaan Karang Taruna dalam meningkatkan potensi desa wisata melalui sadar wisata di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 115–124.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumampouw, M. (2007). *Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Yohana, P., Yuli, I. S., & Dwi, F. P. (2021). Peran Karang Taruna dalam pembangunan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2), 146-156.